

## Partisipasi Politik Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Cilacap

Feni Anggraeni\*<sup>1</sup> dan Agustinus Sugeng Priyanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

### Info Artikel

#### Article History

Disubmit 7 Januari 2020

Diterima 30 Juni 2020

Diterbitkan 2 Juli 2020

#### Kata Kunci

partisipasi politik;  
perempuan;  
PDI Perjuangan

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan di Kabupaten Cilacap dalam kegiatan pemilihan, melobi, organisasi, dan mencari koneksi; serta 2) Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan di Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, dan kajian dokumen. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan dilihat dari kegiatan pemilihan dan organisasi telah berjalan dengan sangat baik, sedangkan untuk kegiatan melobi dan mencari koneksi masih terbilang rendah, hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota perempuan; (2) Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik anggota perempuan PDI Perjuangan di Kabupaten Cilacap ialah dukungan keluarga dan dorongan dari masyarakat yang meliputi kebijakan pemerintah, media massa, dan partai itu sendiri. Saran, PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan kepemimpinan, pelatihan manajemen waktu dan kegiatan yang dikhususkan bagi anggota perempuan untuk meningkatkan kemampuan anggota perempuan secara individu seperti diskusi-diskusi politik, pendidikan politik, dan seminar-seminar politik.

### Abstract

*The purpose of this research is to know: 1) Political participation of women in PDI Perjuangan in Cilacap Regency in election activities, lobbying, organization, and seeking connections; and 2) Factors affecting the political participation of women in PDI-P in Cilacap Regency. The research method used is a qualitative approach. Sources of research data include primary data sources and secondary data sources. The data collection techniques used were direct observation, interviews, and document review. Data validity test used source triangulation. Data analysis used includes the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that: (1) PDI Perjuangan women's political participation, seen from the election and organization activities, has been running very well, while lobbying and connection-seeking activities are still low, this is due to the lack of skills and experience possessed by female members; (2) The factors affecting the level of political participation of female members of the PDI Perjuangan in Cilacap Regency are family support and encouragement from the community which includes government policies, the mass media, and the party itself. Suggestion, PDI Perjuangan Cilacap Regency in an effort to increase women's political participation can be carried out by holding leadership training, time management training and activities specifically for women members to improve the abilities of individual women members such as political discussions, political education, and political seminars.*

\* E-mail: [anggraenifeni47@gmail.com](mailto:anggraenifeni47@gmail.com)  
Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

## PENDAHULUAN

Berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya era Reformasi di tahun 1998, membawa banyak perubahan khususnya dalam sistem politik yang berlaku di Indonesia. Perubahan tersebut membuka peluang yang sangat besar bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di bidang politik. Partisipasi perempuan di bidang politik untuk saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 173 ayat 2 huruf e yang menjelaskan, bahwa partai politik wajib menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan anggota DPR dan tingkat daerah untuk pemilihan umum DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan mengenai keterwakilan perempuan di dunia politik sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 pada pasal 11 huruf b yang menjelaskan, bahwa partai politik wajib menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan.

Peraturan-peraturan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan sebagai kebijakan afirmatif (*affirmative action*) keterwakilan perempuan di bidang politik. Kebijakan afirmatif yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki di bidang politik. Secara realitas adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tidak serta merta meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Salah satu indikator masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik dapat dilihat dari jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang masih rendah (Triwanto,2007:23).

Keterwakilan perempuan yang masih rendah di bidang politik dapat terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah budaya patriarkhi yang berkembang di Indonesia. Budaya patriarkhi merupakan budaya yang melahirkan stereotip bagi perempuan dan pada akhirnya akan memunculkan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan di bidang politik yang dianggap tidak penting. Rendahnya partisipasi politik di Indonesia dapat dilihat dari data hasil pemilihan umum le-

gislatif pada tahun 2019-2024 sebagai berikut.

**Tabel 1.** Komposisi Anggota DPR RI Tahun 2019-2024

Partai Politik	Perempuan	Laki-Laki	Total
PKB	12	46	58
Partai Gerindra	13	64	77
Partai Demokrat	10	44	54
PAN	7	37	44
Partai Golkar	19	66	85
PDI Perjuangan	26	102	128
PKS	9	42	51
PPP	5	14	19
Partai Nasdem	19	40	59
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>455</b>	<b>575</b>

Sumber: *dpr.go.id*

Data Tabel 1 di atas, menunjukkan komposisi keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih belum memenuhi kuota minimal yakni 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Partisipasi politik perempuan yang masih rendah bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat saja, akan tetapi juga terjadi di beberapa daerah.

Rendahnya partisipasi politik perempuan juga terjadi di Kabupaten Cilacap. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga legislatif pada tahun 2014-2019 dan 2019-2024. Jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada tahun 2014-2019 hanya mencapai 9 orang perempuan dari jumlah total 50 orang yang duduk sebagai anggota legislatif di Kabupaten Cilacap. Sedangkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislaif pada tahun 2019-2024 mengalami peningkatan. Dimana dari jumlah total 50 orang yang duduk di lembaga legislatif Kabupaten Cilacap, 13 orang diantaranya adalah perempuan. Namun, ternyata peningkatan jumlah keterwakilan perempuan tersebut belum mampu untuk memenuhi target ideal yakni 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Berikut adalah tabel

**Tabel 2.** Komposisi Anggota Legislatif Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2019 dan Tahun 2019-2024

Nama Partai Politik	Pemilu 2014-2019		Pemilu 2019-2024	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
PKB	1	5	2	6
Partai Gerindra	3	4	3	3
Partai Demokrat	0	3	1	2
PAN	2	4	0	3
Partai Golkar	0	9	0	8
PDI Perjuangan	2	8	4	6
PKS	0	3	1	3
PPP	1	5	1	3
Partai Nasdem	-	-	1	3
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>37</b>
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	

Sumber: *kpu-d-cilacapkab.go.id*

komposisi anggota legislatif Kabupaten Cilacap pada tahun 2014-2019 dan tahun 2019-2024.

Dilihat dari data Tabel 2, menunjukkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang masih rendah di Kabupaten Cilacap. Dari banyaknya partai yang mengikuti pemilihan umum legislatif di Kabupaten Cilacap pada tahun 2014-2019 dan pada tahun 2019-2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang mampu mendudukkan perwakilan perempuan paling banyak pada lembaga legislatif di Kabupaten Cilacap. Bahkan untuk tingkat pusat sekalipun, PDI Perjuangan menjadi partai yang paling banyak mendudukkan perwakilan perempuan pada lembaga legislatif di tingkat pusat.

Keberhasilan PDI Perjuangan dalam mendudukkan perwakilan perempuan paling banyak pada lembaga legislatif di Kabupaten Cilacap dibandingkan dengan partai politik lainnya yang ada di Kabupaten Cilacap selama dua periode pemilihan umum legislatif ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan yang ada di dalam partai yang dilihat dari keikutsertaan perempuan dalam kegiatan pemilihan, melobi, organisasi dan kegiatan mencari koneksi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap yang beralamatkan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 1A, Cilacap Selatan. Fokus penelitian ini berupa partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan di Kabupaten Cilacap dalam kegiatan pemilihan, melobi, organisasi, dan mencari koneksi; dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan di Kabupaten Cilacap yang dilihat dari faktor mikro dan faktor makro. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis data Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017:133) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi Politik Perempuan PDI Perjuangan

Partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap mencakup 4 hal yaitu kegiatan pemilihan, kegiatan organisasi, kegiatan melobi atau *lobbying*, dan kegiatan mencari koneksi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1994:16-17) bahwa partisipasi politik seseorang dapat dilihat dari berbagai bentuk partisipasi diantaranya kegiatan pemilihan, kegiatan melobi (*lobbying*), kegiatan organisasi, dan kegiatan mencari koneksi (*contacting*).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan di Kabupaten Cila-

cap yang paling menonjol terlihat pada kegiatan pemilihan dan kegiatan organisasi. Sedangkan untuk kegiatan melobi dan kegiatan mencari koneksi masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa tidak semua anggota perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap mampu melakukan kegiatan melobi dan kegiatan mencari koneksi. Ketidakmampuan perempuan dalam melakukan kegiatan melobi dan mencari koneksi ini dikarenakan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kegiatan melobi dan kegiatan mencari koneksi yang dimiliki oleh anggota perempuan belum dibarengi dengan kemampuan anggota perempuan dalam kegiatan melobi dan mencari koneksi di lapangan. Anggota perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap dalam kegiatan melobi dan mencari koneksi di lapangan mengalami beberapa kesulitan diantaranya dalam hal mencari sasaran yang akan menjadi objek pelobian maupun yang akan dijadikan sebagai koneksinya. Selain itu, kemampuan komunikasi dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota perempuan secara individu dalam hal melobi dan mencari koneksi juga mempengaruhi partisipasi politik perempuan di kedua kegiatan tersebut.

Partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap dalam kegiatan pemilihan secara umum dapat dilihat dari partisipasi anggota perempuan pada pemilihan legislatif yang meliputi pemberian suara, kampanye dan pencalonan diri sebagai anggota legislatif. *Pertama*, partisipasi politik perempuan dalam kegiatan pemberian suara berjalan dengan sangat baik, hal ini dikarenakan para anggota perempuan kurang setuju dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh seorang individu berupa tindakan tidak memberikan hak suara dalam pemilihan umum atau lebih sering dikenal dengan istilah golput (golongan putih) dalam pemilihan umum. *Kedua*, partisipasi politik perempuan dalam kegiatan kampanye telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang dibuat oleh PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap yang selalu mewajibkan seluruh anggota partai baik perempuan maupun laki-laki untuk terlibat di dalam kegiatan kampanye. *Ketiga*, partisipasi politik perempuan dalam kegiatan pencalonan legislatif telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data calon legislatif pada pemilu tahun 2014-2019 dan pemilu 2019-2024 yang menunjukkan partisipasi perempuan dalam hal pencalonan legislatif itu telah berjalan dengan baik. Dimana pada pemilu tahun 2014-2019 dari jumlah total 50 orang calon legislatif, 20 orang calon legislatif diantaranya adalah perempuan. Sedangkan pada pemilu 2019-2024 dari jumlah total 49 orang calon legislatif, 19 orang calon legislatif diantaranya adalah perempuan. Selain itu, partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif juga dapat dilihat dari jumlah anggota perempuan yang terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2019-2024 yang mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun pemilihan umum sebelumnya yakni pemilihan umum tahun 2014-2019.

Selanjutnya, partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap dalam kegiatan organisasi dapat dilihat dari keterlibatan anggota perempuan dalam kepengurusan partai, rapat umum partai, dan kegiatan-kegiatan organisasi yang berhubungan dengan partai. *Pertama*, keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai di PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap telah berhasil memenu-

hi ketentuan minimal 30% keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai. Hal ini dibuktikan dengan struktur kepengurusan partai yang ada di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, dimana dari total 19 pengurus sebanyak 6 (enam) orang adalah anggota perempuan. *Kedua*, keaktifan anggota perempuan dalam rapat umum PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap tidak hanya dilihat dari keaktifan anggota perempuan menghadiri kegiatan rapat, akan tetapi juga dilihat dari keaktifan anggota perempuan dalam mengemukakan pendapat, saran dan turut aktif dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh partai. Rapat umum yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan partai dan biasanya rapat umum partai diadakan sesuai dengan agenda partai terdekat. *Ketiga*, keikutsertaan anggota perempuan dalam kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh partai. PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap seringkali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan partai yang mengharuskan semua anggota baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut misalnya kegiatan bakti sosial, kegiatan penanaman, kegiatan penyembelihan hewan qurban saat hari Raya Idul Adha, kegiatan yang berhubungan dengan perayaan-perayaan hari besar di Indonesia dan lain sebagainya. Selain itu, PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap juga menyelenggarakan beberapa kegiatan yang ditujukan secara khusus bagi anggota perempuan seperti kegiatan peringatan hari Kartini dan sosialisasi untuk gender serta kegiatan lain yang melibatkan perempuan di dalamnya.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor mikro dan faktor makro. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Handoyo (2008:215) menyatakan bahwa setidaknya terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik setiap individu warga negara, yakni faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro merupakan faktor yang sifatnya lebih umum, pengaruhnya cenderung tidak langsung, dan berada di luar diri individu warga negara. Sebaliknya, faktor mikro merupakan faktor yang sifatnya lebih spesifik, pengaruhnya langsung, dan berasal dari dalam diri individu warga negara.

Secara umum faktor mikro yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap adalah dukungan dan dorongan dari keluarga. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan tempat sosialisasi politik pertama bagi individu. Keluarga mengajarkan seseorang untuk peduli terhadap berbagai tindakan politik di dalamnya, misalnya seperti mengajukan pendapat pertama kali dilakukan seseorang dalam lingkungan keluarga, begitupun dengan menyampaikan aspirasi yang bersifat penolakan akan sesuatu hal juga dipelajari dalam keluarga untuk pertama kalinya.

Selanjutnya, faktor makro yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap secara keseluruhan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, media massa, dan kebijakan yang dibuat oleh partai politik itu sendiri. Dimana kebijakan pemerintah itu

memberikan dasar bagi seorang perempuan untuk dapat terjun ke dalam dunia politik. Media massa menjadi sarana yang membantu perempuan untuk memperoleh informasi dan menyebarkan informasi yang diperolehnya mengenai partai politik maupun perkembangan mengenai dunia politik terbaru dengan mudah. Terakhir partai politik itu sendiri melalui kebijakan partai yang dibuat untuk dapat memberikan ruang dan kesempatan yang sama khususnya bagi perempuan untuk tampil dihadapan publik serta eksistensi dari partai politik itu sendiri akan mempengaruhi seseorang untuk terjun ke dunia politik.

## SIMPULAN

Partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap dapat dikatakan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari 4 indikator hanya ada 2 indikator yang dapat terlaksana dengan baik yaitu: (1) kegiatan pemilihan yang cukup baik, ditandai dengan keaktifan anggota perempuan dalam kegiatan pemberian suara dan kampanye serta dalam pencalonan legislatif yang telah berhasil memenuhi target 30% keterwakilan di setiap daerah pemilihan; (2) kegiatan organisasi yang cukup baik, ditandai dengan keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan partai, keaktifan perempuan dalam rapat umum partai dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan partai. Sedangkan untuk kegiatan melobi dan kegiatan mencari koneksi masih rendah, ditandai dengan kurang kemampuan perempuan dalam melakukan kegiatan melobi dan mencari koneksi di lapangan.

Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap meliputi dukungan keluarga, kebijakan pemerintah, media massa, dan kebijakan yang dibuat oleh partai politik. Keluarga merupakan salah satu bentuk dari faktor mikro yang sangat mempengaruhi partisipasi politik seseorang, karena keluarga adalah tempat sosialisasi politik pertama bagi seorang individu. Kebijakan pemerintah, media massa dan kebijakan yang dibuat oleh partai politik itu sendiri merupakan faktor makro yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap.

## SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) kepada PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan manajemen waktu yang dikhususkan bagi anggota perempuan; (2) kepada perempuan, diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki khususnya dalam hal *lobbying* dan *contacting*, mengingat kedua hal tersebut tidak kalah penting dengan partisipasi perempuan dalam kegiatan pemilihan dan kegiatan organisasi. Usaha anggota perempuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya dapat dilakukan melalui keikutsertaan dalam diskusi-diskusi politik, pendidikan politik yang diadakan oleh partai maupun melalui seminar-seminar politik untuk menambah pengetahuannya di bidang politik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggota DPR RI diakses dari laman <http://www.dpr.go.id/anggota> pada hari Sabtu, 28 Desember 2019 pukul 19.10 WIB.
- Handoyo, Eko. 2008. *Sosiologi Politik*. Semarang: Unnes Press.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- KPUD Cilacap. 2014. *Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2014*. Diakses dari laman [https://kpud-cilacapkab.go.id/data\\_pemilu](https://kpud-cilacapkab.go.id/data_pemilu) pada hari Sabtu, 28 Desember 2019 pukul 19.20 WIB.
- KPUD Cilacap. 2019. *Keputusan KPU Kab Cilacap Tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol Pemilu 2019*. Diakses dari laman [https://kpud-cilacapkab.go.id/data\\_pemilu](https://kpud-cilacapkab.go.id/data_pemilu) pada hari Sabtu, 28 Desember 2019 pukul 19.20 WIB.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Triwanto, Herry. 2007. *Profil Perempuan Anggota DPRD Provinsi Daerah Jawa Tengah Ditinjau dari Perspektif Politik Gender*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.